



Sepenggal Pemikiran John Dewey Tentang Demokrasi

Tusriyanto^{a, 1*} dan Karsiwan^{a, 2}

a IAIN Metro, Indonesia

| Informasi artikel | ABSTRAK |
|--|--|
| Sejarah artikel: Diterima : 29 Juni 2021 Revisi : 20 Agustus 2021 Dipublikasikan : 30 Desember 2021 | <i>Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan pemikiran Dewey tentang demokrasi bahwasanya tingginya partisipasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dapat mendorong pada terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.</i> |
| Kata kunci: Dewey Demokrasi Rakyat | <i>Pemerintahan yang demikian merupakan pemerintah yang demokratis, kedekatan dengan rakyat akan menjadi perekat bangsa. Sedangkan pentingnya pendidikan demokrasi antara lain dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi. Nilai nilai demokrasi dipercaya akan membawa kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dalam semangat egalitarian dibandingkan idiologi non-demokrasi.</i> |
| Keywords: Dewey Democraton Citizenry | ABSTRACT <i>The purpose of this review are to described thought dewey about democracy that the wide participation of the common people in the national and state life, it can be pushed on the formation of a transparent and accountable. Of government in which is the democratic government , proximity to the people will to become the adhesive for the people. While the importance of education democracy can be seen from the values of contained in democracy. The democracy believed likely bring the national and state life better in the spirit of egalitarian than non-demokrasi ideologically driven.</i> |

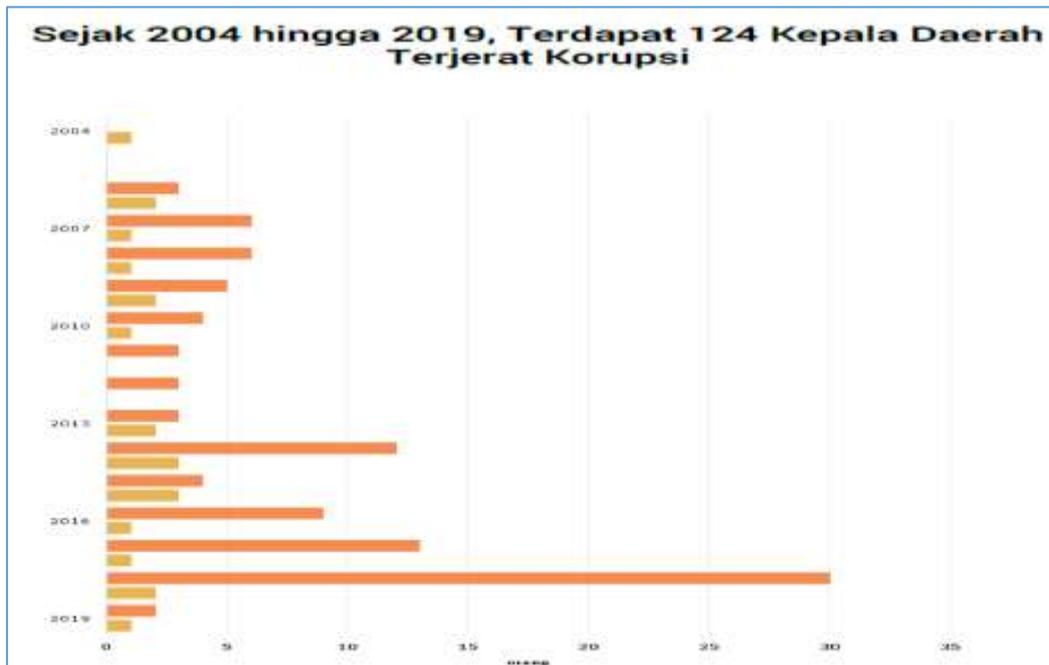
Copyright © 2021 (Tusriyanto, dkk.) All Right Reserved

Pendahuluan

Peran masyarakat yang demokratis adalah bagian integral dalam mengembangkan sumber daya manusia, karena setiap warga adalah pribadi yang berharga, bukanlah sebagai alat untuk melayani maksud negara atau sarana untuk mencapai tujuan dari pihak yang berkuasa. Ide pokok demokratis adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur hidup bersama. Ia menekankan bahwa demokrasi merupakan suatu keyakinan, suatu prinsip utama

yang harus dijabarkan dan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk aturan sosial politik. Partisipasi masyarakat menjadi dasar atau bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam membuat berbagai aturan, kebijakan sebagai tatanan kehidupan kenegaraan, ini adalah konsep utama dari masyarakat yang demokratis.

Menurut Komarudin (2008) salah satu keunggulan demokrasi adalah sistem yang paling memungkinkan bagi keberlangsungan proses seleksi dan suksesi secara fair bagi hadirnya pemimpin yang dianggap paling memiliki kompetensi baik dari segi integritas maupun keahlian, apapun agama maupun golongannya. Dengan satu catatan apabila keberadaan serta prosedur demokrasi di pahami. Namun demikian demokrasi bukanlah masalah prosedural melainkan yang terpenting adalah komitmen untuk menjunjung tinggi hukum serta nilai-nilai keberanaran yang melekat pada seseorang serta sebuah bangsa. Indonesia baru menyentuh aspek prosedural dari demokrasi belum memasuki keberadaan serta membangun budaya demokrasi yang memerlukan sikap toleran serta melindungi hak-hak warga negara secara keseluruhan. Berbagai kasus bermunculan dengan dijadikannya pilkada sebagai ajang perebutan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Berikut kasus kepala daerah yang terjerat kasus korupsi (2004-2019):



Grafik 1. Kasus Kepala Daerah Terjerat Korupsi (2004-2019)

Akibat negatif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah munculnya dinasti politik yang menjadikan demokrasi terbajak (*hijacked democracy*) oleh sirkulasi hubungan inti genealogis, berdasarkan relasi kekeluargaan maupun di luar garis *genealogis* yang memiliki kepentingan terhadap pelanggengan kekuasaan keluarga. Dinasti politik muncul sebagai eksekusi dari warisan

feodalisme yang masih menancap kuat di masyarakat. Studi pendekatan ini dilakukan oleh Asako (2010) dan McCoy (1994) yang menganalisis tumbuhnya dinasti politik justru terjadi karena adanya kolusi bisnis-politik di tingkat lokal. Dalam hal ini, jejaring keluarga telah menguasai berbagai proyek pembangunan daerah yang kemudian dibagi-bagikan kepada kroni-kroninya. Dinasti politik berperan sebagai patron dalam menjaga stabilitas kolusi tersebut dengan menempatkan sanak familinya ke dalam jajaran perusahaan maupun pemerintahan. Oleh karena itu, praktik penjarahan ekonomi berlangsung secara tidak terkendali karena praktiknya selalu dilakukan oleh jejaring elit keluarga. Dinasti politik merupakan bentuk kolektif dari patronase elit dalam wujud kolektif yang didasarkan pada hubungan famili, etnisitas, maupun hubungan darah lainnya yang intinya memunculkan monarki dalam demokrasi di aras lokal. Pengawasan atau *controlling* dari pemerintah melalui lembaga *independent* yang ditunjuk harus mampu membersihkan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut di atas agar tidak mengakar dan membudaya sehingga mengakar di seluruh wilayah nusantara. Suatu negara dianggap demokratis jika memenuhi persyaratan, misalnya jaminan kebebasan berekspresi, proses pemilihan yang adil dan tingkat korupsi yang rendah.

Jika korupsi, kolusi dan nepotisme berlangsung terus-menerus tanpa pengawasan dan tindakan yang tegas, demokrasi yang selama ini kita idam-idamkan sebagai jalan diyakini paling menjanjikan dan dianggap paling baik untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sepertinya sudah kehilangan jati dirinya atau rohnya. Setidaknya ada empat prasyarat yang membuat tumbuhnya demokrasi lebih memberikan harapan, antara lain:

1. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan.
2. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat yang *favorable* bagi pertumbuhan demokrasi, seperti kelas menengah, LSM, para pekerja dan sebagainya.
3. Hubungan internasional yang lebih adil dan seimbang.
4. Sosialisasi pendidikan kewargaan

Demokrasi yang idel menurut Dewey, antara lain *Pertama* menandakan tidak hanya semakin banyak poin kepentingan bersama, tetapi juga ketergantungan yang lebih besar pada pengakuan kepentingan bersama sebagai faktor dalam kontrol sosial. *Kedua* berarti tidak hanya interaksi yang lebih bebas antara kelompok-kelompok sosial (yang sebelumnya terisolasi sejauh niat dapat menjaga pemisahan) tetapi juga mengubah kebiasaan sosial-penyesuaian yang berkelanjutan dengan memenuhi situasi-situasi baru yang dihasilkan oleh beragam hubungan seksual. Dan kedua sifat inilah yang menjadi ciri masyarakat yang dibentuk secara demokratis. Lebih lanjut penulis mencoba memaparkan beberapa pemikiran Dewey terkait dengan kehidupan masyarakat yang demokratis yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan

pertimbangan sejalan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Selain itu, mengaitkan dengan perkembangan demokrasi di belahan dunia ini dengan berbagai sumber yang relevan.

Metode

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. (Lasa, 2009: 207). Kata ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna bersifat keilmuan atau memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. “Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia” (Sulistyo-Basuki, 2010:110).

Penelitian deskriptif mengenal berbagai bentuk yang dapat dikategorikan seperti survei, studi kasus, kajian, kausal-komparatif, kajian korelasi, dan sebagainya. Setiap bentuk penelitian deskriptif mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda, sedangkan penelitian deskriptif ini termasuk dalam kategori “studi kasus”.

Hasil dan pembahasan

John Dewey dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, negara bagian Vermont, Amerika Serikat. Ia dibesarkan di kota yang sama dari keluarga yang saleh dengan latar belakang ekonomi kelas menengah. Ibunya adalah orang Kristen yang berlatarbelakang gereja evangelikal sehingga memiliki pengawasan yang cukup ketat terhadap kehidupan rohaninya. Namun Dewey tidak senang dengan cara demikian dan menimbulkan kekecewaan baginya, karena baginya, perasaan agama tidak sehat jika dinilai dan dijelaskan secara seksama sejauh perasaan itu ada, baik, dan sedang bertumbuh.

Pendidikan yang dilajalannya hingga SMA, berporos pada penghafalan. Cara belajar yang demikian membosankan, dan ia termasuk siswa yang rajin dan pintar, maka ia dapat menyelesaikan pendidikan dasar pada usia dua belas tahun. Pendidikan menengah yang dijalannya lebih berorientasi pada studi klasik (bahasa, sastra, dan matematika). Sesudah tamat SMA, Dewey melanjutkan pendidikan di Universitas Vermont dan menyelesaikan

pendidikannya di bidang filsafat dengan nilai "pujian." Ia juga menyelesaikan pendidikan di Universitas Hopkins di kota Baltimore, negara bagian Maryland, dengan gelar Ph. D. di bidang filsafat pada tahun 1884. Setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, Dewey melibatkan diri dalam dunia pendidikan.

Ia pernah menjadi guru SMA di Oil City, negara bagian Pennsylvania dan menjadi dosen di Michigan, Minnesota, Chicago, dan Universitas Columbia di New York. Di Universitas Cichago, Dewey menjabat sebagai Dekan Fakultas Filsafat pada tahun 1894. Pada saat itu, Departemen Ilmu Jiwa dan Departemen Pedagogi adalah bagian dari Fakultas Filsafat. Di sinilah Dewey mengembangkan konsep pedagogi yang dimilikinya melalui sebuah laboratorium yang setaraf dengan SD, SMP, SMA, dan sekolah kejuruan.

Hasilnya sangat baik serta dipuji karena menjadi wadah pendidikan yang paling kreatif dalam dunia pendidikan di Amerika, bahkan di dunia pada saat itu, walaupun Dewey sendiri bukanlah seorang yang berlatar belakang kuliah dalam bidang pendidikan. Rumah tangganya dinilai sebagai rumah tangga yang baik. Isteri pertamanya bernama Alice Chapman. Alice adalah mantan mahasiswanya yang kemudian menjadi pimpinan dari sekolah laboratorium di Universitas Chicago. Mereka memiliki enam orang anak, tetapi dua orang puteranya meninggal ketika mereka masih muda. Pada tahun 1905, mereka pindah ke Universitas Columbia dan Alice meninggal pada tahun 1927. Pada tahun 1946, Dewey menikah lagi dengan seorang janda bernama Roberta Grant, yang usianya tiga puluh tahun lebih muda. Kehidupan keluarga yang dijalannya, baik dengan isteri pertama maupun isteri kedua, semuanya bahagia. Rumah tangganya dijadikan sebagai laboratorium untuk pengujian kebenaran gagasannya. Dewey meninggal pada tanggal 1 Juli 1952 di New York dengan meninggalkan kurang lebih 700 artikel dan 42 buah buku dalam berbagai bidang (filsafat, pendidikan, seni, sains, politik, dan pembaharuan sosial). Berdasarkan pengalaman pola asuh yang dialami oleh John Dewey dari orang tuanya, pengalamannya berumah tangga sebagai seorang suami dan ayah, pengalamannya dalam menjalani pendidikan, penelaahannya terhadap filsafat, ilmu jiwa, dan tulisan dari para pendidik seperti Pestalozzi, Froebel, dan Herbarc, pengamatannya terhadap pengalaman para guru SMP/SMA, dan pengawasnya terhadap laboratorium sekolah yang didirikannya, telah melahirkan konsep pemikirannya tentang filsafat, agama, serta teori dan praktek pedagogi yang dimilikinya. Berbagai pemikiran Dewey banyak digunakan di dunia filsafat maupun pendidikan.

1. Teori dan Kepemimpinan Demokratis dari Dewey

Ada dua hal yang dapat dilihat untuk mengukur nilai suatu bentuk kehidupan sosial adalah sejauh mana kepentingan suatu kelompok dibagi kepada semua anggotanya, dan terpenuhinya kebebasan berinteraksi dengan kelompok lain. Dengan kata lain, masyarakat yang tidak diinginkan adalah masyarakat yang secara internal dan eksternal membangun hambatan untuk melakukan kebebasan berkomunikasi dan berinteraksi. Suatu masyarakat yang membuat ketentuan untuk berpartisipasi dalam kebaikan semua anggotanya dengan ketentuan sama serta dapat menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaganya melalui interaksi berbagai bentuk kehidupan merupakan masyarakat demokratis .

Menurut John Dewey (1935), demokrasi bukan hanya sekedar kebebasan dalam melakukan tindakan, tetapi yang lebih diutamakan adalah kebebasan dalam kecerdasan (*freedom of Intelligence*). Oleh karena itu komitmen demokrasi untuk membebaskan kecerdasan yang fundamental daripada kebebasan dalam bertindak. Ciri kelompok yang demokratis adalah adanya unsur-unsur *popular sovereignty, freedom, equality, individualism* dan *social responsibility*. Secara implisit *popular sovereignty* dapat diartikan memutuskan suatu permasalahan berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota kelompok. Dalam terminasi Dewey *Freedom* diartikan sebagai kebebasan dalam melakukan tindakan, yang didasari oleh kebebasan berpikir. Untuk melakukan suatu tindakan seseorang harus memiliki kemampuan untuk berpikir dan berbicara secara bebas. Kesimpulannya kemampuan melakukan refleksi dan komunikasi merupakan prasyarat (*prerequisite*) untuk melakukan tindakan demokratis yang cerdas. Prinsip *Equality* dalam sistem demokrasi menunjukkan bahwa setiap anggota kelompok adalah setara. Tidak ada anggota kelompok yang dapat mengklaim bahwa dirinya harus diperlakukan lebih istimewa dibandingkan anggota yang lain. Integritas setiap individu yang bebas sangat dihargai. Setiap individu memiliki hak berpendapat dan bertindak tanpa intimidasi atau tekanan dari anggota lain. Selanjutnya *individualism* dan *social responsibility*, Hu Shi, seperti Dewey, menganjurkan individualisme sosial yang berbeda dari egoisme dan ditandai oleh pemikiran independen dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam pemahamannya, individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu masyarakat mengandaikan rasa tanggung jawab individu atas perilaku seseorang dan menyerukan individu tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakatnya dengan kekuatan kreatifnya. Kunci untuk partisipasi kreatif dan bertanggung jawab terletak pada kesadaran individu arti dari ide-idenya sendiri dan arti dari tindakannya sendiri (lih. Grieder 1970, 108). Prinsip *equality* atau kesetaraan tersebut di

atas sejalan dengan konstitusi Madinah yang menempatkan persamaan seluruh warga sebagai elemen pokok *civil society* atau masyarakat madani.

John Dewey melihat begitu erat hubungan antara pendidikan dan demokrasi, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan negara yang demokratis. Pendidikan demokrasi sebagai merupakan upaya yang dilakukan dengan penuh kesadaran membentuk kemampuan warga negara berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting. Dengan tingginya partisipasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dapat mendorong pada terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintahan yang demikian merupakan pemerintah yang demokratis, kedekatan dengan rakyat akan menjadi perekat bangsa. Sedangkan pentingnya pendidikan demokrasi antara lain dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi. Nilai-nilai demokrasi dipercaya akan membawa kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dalam semangat egalitarian dibandingkan idiologi non-demokrasi. Masyarakat demokratis menolak prinsip otoritas eksternal, ia harus menemukan pengganti dalam disposisi dan minat sukarela; ini hanya dapat dibuat dengan pendidikan. Namun ada penjelasan yang lebih dalam. Demokrasi lebih dari sekadar bentuk pemerintahan; ini terutama merupakan cara hidup yang terkait, dari pengalaman yang dikomunikasikan bersama. Dengan kondisi saat ini rasa-rasanya pemikiran Dewey ini cocok jika diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sedang carut marut saat ini dimana kepentingan rakyat terabaikan.

Manusia Indonesia sejak dahulu telah memiliki sikap dan perilaku gotong royong, saling membantu dalam berbagai hal secara bersama-sama. Hal ini masih tampak jelas dalam berbagai segi kehidupan di pedesaan. Mereka dengan sukarela mengikatkan diri pada budaya kebersamaan dalam banyak hal, seperti hajatan massa, kerja bakti, dukungan pada anggota masyarakat yang tertimpa musibah, pesta pernikahan, atau kerja komunal dalam tugas sebagai petani dan nelayan yang menjadi pekerjaan utama di wilayah-wilayah pedesaan pada umumnya. Salah satu ciri masyarakat agraris adalah sikap kegotong-royongan. Semua pekerjaan, terutama yang terkategori berat, dilakukan secara bersama-sama tanpa pamrih. Tidak mengherankan apabila pada suatu rencana perhelatan besar cukup disebarkan dari mulut ke mulut (mestinya, dari mulut ketelinga) masyarakat akan berduyun-duyun mengambil peran atau tugas sesuai dengan keahliannya tanpa harus diundang secara formal. Sikap gotong royong pada dasarnya adalah melakukan sesuatu secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.

2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Namun demikian Dewey berpendapat bahwa pernyataan bukanlah berasal dari Tuhan, tetapi penemuan yang dilakukan manusia melalui hubungan sosial dalam masyarakat yang demokratis. Dalam masyarakat yang demokratis, masyarakat tidak terikat pada dogma yang berasal dari masa lampau, karena masyarakat berhak untuk mencari sarana dalam memecahkan masalah yang muncul pada saat ini. Kebebasan yang dimiliki manusia memacu perkembangan sains modern yang keberadaannya merupakan kesatuan yang lebih tinggi dari peran agama di masa lampau. Kebenaran supernatural tidak dapat dilalui karena itu masalah kodrati yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara akurat obyektif. Dewey juga berpendapat bahwa kesalahan yang dilakukan oleh manusia bukanlah dosa yang harus diampuni, karena kesalahannya adalah ketidaksesuaian pelajaran dalam metode dengan akal. sebenarnya yang diperlukan manusia adalah perubahan yang diterapkan kembali dan diperbaiki ulang agar ia menjadi benar.

Dengan berpandangan demikian, bagi Dewey, tidak ada kebenaran dan nilai keagamaan serta kaidah moral dan etika yang rerep dan mutlak. Semuanya relatif dan selalu berubah seperti perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebudayaan, masyarakat, dan lingkungan. pengujian kualitas nilai dan kebenaran dilaksanakan dengan cara yang sama seperti yang digunakan untuk menguji kebenaran pengetahuan dengan metode empiris berdasarkan berbagai pengalaman manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai bukanlah hal yang bersifat supernatural, universal, dan agamawi. Nilai adalah suatu yang disetujui melalui diskusi terbuka berdasarkan pada bukti-bukti empiris dan obyektif, bukan dipaksakan dengan suatu kekuatan untuk diterima. Di Indonesia agama merupakan satu institusi politik yang terpenting dalam sistem Pancasila, dengan sebab agama para politisi memusatkan atau mencari legitimasi baik secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya, agama juga dijadikan sebagai sumber bagi ketajaman-ketajaman moral dan keputusan-keputusan terhadap rakyat yang merupakan basis dari masyarakat Indonesia. Jelas pemikiran Dewey bertentangan dengan demokrasi Pancasila karena meninggalkan kebenaran dari Tuhan.

2. Kritik Terhadap Pemikiran John Dewey

Dengan mencermati kepada konsep pemikiran Dewey tentang pragmatisme dan relativisme yang bersumber pada pengalaman dan penggunaan metode, maka berdasarkan

perspektif Islam, konsep John Dewey dapat dikritisi bahwasanya konsep kebenaran yang diusungnya mengabaikan Firman Allah, sehingga bertentangan dengan Al-qur'an. Kebenaran adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh akal sehat, yang tidak akan dapat ditumbangkan oleh perkisaran zaman, yang menolak dari segala yang salah, menentang yang bobrok, angan-angan yang tak mendasar. Yang secara nyata Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa perkara yang tetap, tegas dan tak akan menyesatkan umat manusia, yang akan membahagiakan bagi siapa saja yang mengambil sebagai petunjuk, adapun yang ingkar di neraka. Al-Qur'an menjelaskan arti kebenaran dalam dua hal, pertama menjelaskan makna kebenaran berarti sesuatu yang real dan jelas artinya pembenaran terhadap realitas, makna yang kedua melalui penjelasan tentang lawan kata "benar" yaitu kata "bathil" atau "dhalal" (kesesatan).

32. Maka (Zat yang demikian) Itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka Bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)?

26. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?." dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.

Ayat tersebut sekaligus menjelaskan keadaan orang-orang kafir yang sudah terbiasa menentang kebenaran yang telah dijelaskan dengan hujjah dan bukti kebenaran. Mereka mempertanyakan, apa yang dikehendaki Allah dengan mendatangkan misal yang rendah ini, yakni dengan memasukkan hal-hal yang remeh seperti lalat dan nyamuk? Jika mereka ini menyadari hikmah yang terkandung di dalam misal tersebut, jelas mereka itu tidak akan berpaling atau menantang. Maka merupakan suatu kenyataan bahwa perkataan paling baik adalah yang dapat mengungkapkan kenyataan sesuatu. Dengan demikian, pihak pendengar akan mengetahui dan memahami secara baik, di samping mengambil sebagai petunjuk ke arah kebenaran.

Selanjutnya, demokrasi dipandang oleh kaum radikal sebagai suatu bentuk pengingkaran kedaulatan Tuhan yang mutlak, bahkan sebagai perampasan hak kedaulatan tuhan itu sendiri. Seluruh sistem pemerintahan yang tidak di dasari oleh syariat Islam dan

menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat atau parlemen, merupakan sistem yang bertentangan dengan syariat sehingga bisa menjadi bagian dari kekufuran. Seluruh umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa menjalankan sebuah pemerintahan sebagai alat untuk melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah SWT dalam melaksanakan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan umat. Semua yang dijalankan harus bernilai ibadah sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW serta para ulama sebagai penerus para Nabi.

Dewasa ini, negara-negara Islam umumnya dikuasai elite politik sekuler, tapi mereka mendapat tantangan yang semakin meningkat dari gerakan Islam. Dalam beberapa kasus, gerakan Islam berhasil mengambil alih kekuasaan (di Iran atau Sudan, misalnya), atau berbagi kekuasaan dengan elite politik sekuler. Bisa dimengerti jika dalam pertarungan kekuasaan, elite sekuler takut pada gerakan Islam. Islam muncul disaat demokrasi tidak lagi mampu menciptakan kesejahteraan, kedamaian dan keadilan bagi rakyat dalam sebuah negara. Namun demikian keberadaan Islam dianggap sebagai bentuk ancaman bagi bagi keamanan peradaban Barat inilah yang terjadi saat ini.

Demokrasi tampak "sulit berkembang " di lingkungan kultur yang non-Barat dan non-Kristen seperti Islam/Arab. Di samping itu, sekurang-kurangnya terdapat dua kendala lain bagi berkembangnya demokrasi di negara-negara Islam. *Pertama*, di kalangan Islam sendiri belum ada kesepakatan tentang hubungan antara Islam dan demokrasi. *Kedua*, proses demokratisasi di negara-negara Islam sedikit banyak juga tergantung pada faktor eksternal. Artinya, keberhasilan atau kegagalan proses demokratisasi tergantung dari apakah negara-negara di luar kawasan ini, khususnya negara-negara Barat sendiri, mendorong atau justru menghambat demokratisasi. Jika dikembalikan lagi dengan konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Dewey jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak bisa diterima karena meletakkan kebenaran mutlak pada pengalaman manusia, sementara Islam dengan tegas mengajarkan bahwa kebenaran mutlak adalah dari Allah SWT tidak dapat diganggu gugat. Demokrasi yang seharusnya dipergunakan dinegara Indonesia harus sejalan dengan ajaran Islam, sehingga membawa kemaslahatan bagi umat manusia bukan sebaliknya membawa kehancuran. Kita harus berbenah karena faktanya demokrasi yang telah dianggap sebagai jaminan pertumbuhan dan kemakmuran selama bertahun-tahun, terutama karena struktur demokrasi sering dikaitkan dengan ekonomi pasar, telah kehilangan ruang lingkupnya dengan kebangkitan Cina dan negara-negara lain yang berkinerja sangat baik dalam bidang ekonomi, tetapi buruk dalam hal demokrasi.

Simpulan

Demokrasi merupakan jalan yang diyakini sebagai solusi terbaik yang akan membawa masyarakat Indonesia kesuatu tatanan kehidupan baru yang lebih baik. Menurut Dewey demokrasi yang baik harus menyertakan partisipasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintahan yang demokratis tidak memberikan jarak atau sekat bagi rakyatnya karena kedekatan dengan rakyat akan menjadi perekat bangsa. Nilai-nilai demokrasi dipercaya akan membawa kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dalam semangat egalitarian dibandingkan idiologi non-demokrasi.

Hal yang terpenting untuk kita yakini bahwasanya demokrasi adalah alat dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, oleh karenanya harus didasarkan pada kebenaran nilai-nilai Islam. Nilai-nilai yang bertentangan dengan kebenaran Islam harus ditinggalkan karena tidak akan membawa kebaikan atau kemaslahatan bagi umat manusia. Demokrasi Pancasila salah satunya yang menempatkan nilai-nilai ke-Tuhanan sumber ketajaman moral dan keputusan-keputusan terhadap rakyat yang merupakan basis rakyat Indonesia. Pancasila merupakan hasil dari tumbuhnya kesadaran diantara para pemimpin bangsa karena permasalahan yang besar terhadap sekularisme dan liberalisme modern, namun demikian menjauhkan fanatisme yang berlebihan.

Daftar Pustaka

- A. Ubaidillah, Abdul Rozak. *Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*. Edisi Ketiga. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. vii-ix
- Azyumardi A., *Reposisi Hubungan Agama dan Negera (Merajut Kerukunan Antarumat)*. Edisi Pertama. (Jakarta: Kompas, 2002), h.12-13
- Bilveer Singh, Abdul Munir Mulkhan. *Teror Dan Demokrasi Dalam I'dad (Persiapan) Jihad (Perang) Sudut Pandang Kaum Radikal*. (Kota Gede: Metro Epistema, 2013), h. 93
- Et.al MUchlis M. hanafi, *Tanggung Jawab Sosial (Tarfsir Al-Qur'an Tematik), Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011), ii <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.
- <http://lipi.go.id/berita/islam-radikalisme-dan-demokrasi/734> diakses 10 Juli 2020
- John Dewey, 'Democracy and Education', *Nation* (2001), 1-368 <<https://doi.org/10.4324/9781351302326-9>>.
- Lei Wang, *John Dewey 's Democratic Education and Its Influence on Pedagogy in China*, 1937.
- Peniel C.D. Maiaweng, 'Analisis Terhadap Konsep Pemikiran John Dewey', *Jurnal Jaffray*, 7.2 (2009), 73 <<https://doi.org/10.25278/jj71.v7i2.29>>.

Sholihudin Al-Ayubi, 'Konsep Kebenaran Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11.1 (2018), 53–78.

Wasisto Raharjo Djati, 'Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal', *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 18.2 (2015) <<https://doi.org/10.7454/mjs.v18i2.3726>>.

Zamharir. *Agama dan Negara (Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid)*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Murai Kencana, 2004), h. ix